



Diplomasi Iklim Indonesia terhadap ASEAN pada masa Pemerintahan Joko Widodo

Grace Regina^{1*}, Wilson M.A. Therik¹, Novriest Umbu Walangara Nau¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Univeristas Kristen Satya Wacana, Indonesia

*Korespondensi: 372020080@student.uksw.edu

Info Artikel

Diterima 30
Oktober 2024

Disetujui 10
November 2024

Dipublikasikan 30
November 2024

Keywords:
Diplomasi iklim,
Pemerintahan
Presiden Joko
Widodo, ASEAN

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution

ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Diplomasi iklim merupakan pertimbangan krusial bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Krisis iklim yang tak terhindarkan memerlukan mitigasi dan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. ASEAN, sebagai kawasan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, membutuhkan pendekatan diplomasi iklim yang efektif, baik di tingkat domestik maupun regional. Penelitian ini bertujuan memahami diplomasi iklim Indonesia terhadap ASEAN selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan landasan teori fungsionalis David Mitrany, yang menekankan pentingnya pembentukan institusi atau badan ahli untuk menangani isu spesifik. Pendekatan yang digunakan melibatkan isu-isu spesifik. Misalnya, upaya Indonesia dalam mendorong pembentukan kerangka kerja regional untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan investasi energi terbarukan di ASEAN mencerminkan komitmen untuk menciptakan solusi bersama. Badan yang fokus menangani masalah iklim dapat memaksimalkan peran Indonesia dalam mengatasi salah satu penyebab utama, seperti polusi asap lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode memiliki potensi untuk memaksimalkan diplomasi iklim melalui penguatan institusi yang relevan. Keberhasilan ini dapat dijadikan contoh signifikan selama keketuaan ASEAN 2023. Dengan memanfaatkan kolaborasi multi-stakeholder dan pendekatan multisektor, Indonesia berpeluang besar memainkan peran strategis dalam mengatasi krisis iklim di kawasan ASEAN secara lebih efektif.

Abstract

Climate diplomacy is a crucial consideration for policy makers, both government and non-government. The inevitable climate crisis requires mitigation and collaborative efforts from various stakeholders. ASEAN, as a region that is vulnerable to the impacts of climate change, requires an effective climate diplomacy approach, both at the domestic and regional levels. This research aims to understand Indonesia's climate diplomacy towards ASEAN during the administration of President Joko Widodo. This research uses a quantitative approach based on David Mitrany's functionalist theory, which emphasizes the importance of establishing institutions or expert bodies to handle specific issues. The approach used involves specific issues. For example, Indonesia's efforts to encourage the establishment of a regional framework to reduce carbon emissions and increase renewable energy investment in ASEAN reflects a commitment to creating joint solutions. An agency that focuses on dealing with climate

issues can maximize Indonesia's role in addressing one of the main causes, such as transboundary haze pollution. The research results show that President Joko Widodo's leadership over two periods has the potential to maximize climate diplomacy through strengthening relevant institutions. This success can be used as a significant example during the 2023 ASEAN chairmanship. By utilizing multi-stakeholder collaboration and a multi-sector approach, Indonesia has a great opportunity to play a strategic role in overcoming the climate crisis in the ASEAN region more effectively.

1. Pendahuluan

Proyeksi terbaru dari *Center for Strategic and International Study* (CSIS) menyatakan bahwa ASEAN adalah *one of the world's most vulnerable regions to climate change, unless countries make dramatic cuts in greenhouse gas pollution* (CSIS, 2021). ASEAN sendiri memiliki populasi yang banyak bertempat tinggal di wilayah pesisir yang sangat rentan pada kenaikan air laut. Pada saat yang sama perekonomian ASEAN bergantung pada sumber daya alam baik itu perikanan, pertanian dan kehutanan yang juga tidak luput dari dampak perubahan iklim. Wilayah subur ASEAN terbanyak justru di wilayah pesisir, secara keseluruhan ASEAN masih sangat rentan dan kurang siap dalam mitigasi perubahan iklim karena pusat pemukiman dan sumber daya alam mengikuti garis Pantai (ASEAN Studies Center, 2021)

Diplomasi iklim awalnya tidak hanya menjadi fungsi utama dari negara dan wakilnya yaitu diplomat-diplomat. Namun *diplomasi iklim* justru dimulai sebagai diplomasi *multi-stakeholders* yang melibatkan banyak ilmuwan dan LSM sebagai perwakilan dari pemerintah. Definisi *diplomasi iklim* diberikan oleh Uni Eropa yang setuju bahwa *diplomasi iklim* sendiri umumnya merujuk pada penggunaan alat diplomatik untuk mendukung capaian internasional terkait iklim dan mitigasi dampak negatif dari perubahan iklim yang berdampak perdamaian, stabilitas dan kemakmuran (European Union, 2022).

Diplomasi iklim, atau *climate diplomacy*, berakar dari kesadaran akan perubahan iklim (*climate change*) sebagai isu lintas batas (*borderless issue*) yang tidak mengenal sekat geografis maupun politik. Isu ini menyentuh semua negara tanpa kecuali, karena dampaknya dirasakan secara global, baik melalui bencana alam, kenaikan suhu, maupun kerentanan ekosistem. Dalam konteks ini, diplomasi iklim muncul sebagai upaya untuk menjembatani kebutuhan mendesak akan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing negara yang beragam. Namun, proses ini tidaklah sederhana karena diplomasi iklim harus mengelola dinamika yang kompleks antara kepentingan nasional dan kebutuhan kerja sama internasional. Setiap negara memiliki prioritas dan tantangan berbeda, sehingga diperlukan manuver khusus dalam memahami dan menyelaraskan kepentingan berbagai pihak. Melalui pendekatan strategis ini, negara-negara dapat membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan yang mendukung aksi kolektif demi menjaga keberlanjutan lingkungan global (Mabey & Gallagher, 2013).

Perubahan iklim menjadi ancaman serius yang memerlukan respons kolektif dari berbagai negara, termasuk kawasan ASEAN. Sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memegang peran kunci dalam memimpin diplomasi iklim regional. Namun, selama pemerintahan Joko Widodo,

diplomasi iklim Indonesia terhadap ASEAN menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan Indonesia pada sektor berbasis fosil, seperti batu bara, yang menjadi penghambat transisi energi. Selain itu, koordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya sering kali terhambat oleh perbedaan prioritas nasional masing-masing negara anggota. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen global melalui Nationally Determined Contributions (NDC) dan target net-zero emissions, implementasi kebijakan domestiknya sering kali tidak selaras dengan janji tersebut. Kesenjangan ini tercermin dalam masih tingginya tingkat deforestasi dan penggunaan energi fosil. Di tingkat ASEAN, perbedaan kapasitas dan komitmen iklim antarnegara anggota memperburuk situasi, mengakibatkan rendahnya efektivitas kerja sama regional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin informal ASEAN untuk mendorong kebijakan iklim yang lebih ambisius. Diplomasi iklim Indonesia sering kali hanya berfokus pada agenda internasional, sementara upaya di tingkat regional kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, ASEAN belum memiliki mekanisme kolektif yang kuat untuk menghadapi perubahan iklim, seperti sistem pembiayaan iklim atau kerangka kerja untuk transisi energi. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu meningkatkan perannya dalam memimpin diplomasi iklim di ASEAN. Salah satu langkah strategis adalah membentuk mekanisme regional untuk pembiayaan iklim yang mendukung proyek lintas negara di bidang energi terbarukan dan perlindungan lingkungan. Selain itu, Indonesia dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara negara-negara ASEAN dalam membangun infrastruktur hijau serta berbagi teknologi untuk mitigasi perubahan iklim. Sebagai tambahan, Indonesia perlu memperkuat kampanye kesadaran perubahan iklim baik di dalam negeri maupun di kawasan ASEAN. Diplomasi publik dapat menjadi sarana untuk menggali dukungan dari masyarakat dan sektor swasta, termasuk mendorong investasi hijau di Asia Tenggara. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dalam menghadapi perubahan iklim dan membantu ASEAN menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Studi kepustakaan dimana penulis mencari dan memilih sumber-sumber berupa dokumen, buku, majalah, jurnal dan sumber online lainnya seperti *website* suatu lembaga. Demikian, unit amatan dalam penelitian ini adalah Kebijakan luar negeri Indonesia berkaitan dengan diplomasi iklim terutama keputusan yang dibuat berdasarkan kerjasama negara-negara ASEAN selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini akan menghimpun semua informasi mengenai Kebijakan-kebijakan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai yang meng-*address* perubahan iklim. Selain itu, penulis juga akan menggunakan literatur-literatur yang memuat data terkait perkembangan ataupun perjanjian untuk isu perubahan iklim dari laman aktor-aktor non negara yang *concern* terhadap lingkungan seperti *greenpeace*.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis akan mencari, memilih, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan, yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku, majalah, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber online lainnya seperti *website* lembaga-

lembaga terkait. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam diplomasi iklim, khususnya yang berhubungan dengan kerjasama negara-negara ASEAN selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penulis akan mengorganisasi, mengklasifikasikan, dan menyaring data yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan literatur online, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan luar negeri Indonesia terkait diplomasi iklim dan kerjasama negara-negara ASEAN. Analisis akan dilakukan dengan cara membandingkan berbagai kebijakan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berfokus pada perubahan iklim, serta menilai bagaimana kebijakan tersebut sejalan dengan perjanjian internasional dan pengaruh aktor non-negara, seperti organisasi lingkungan internasional. Penulis akan menganalisis tren, pola, dan perubahan yang terjadi dalam kebijakan tersebut serta menilai dampak dari kerjasama ASEAN dalam konteks diplomasi iklim. Pendekatan ini akan digunakan untuk menggambarkan kebijakan Indonesia secara menyeluruh, memahami keputusan-keputusan yang diambil dalam diplomasi iklim, dan mengevaluasi bagaimana Indonesia berperan dalam isu perubahan iklim di tingkat regional dan global. Hasil analisis akan disajikan secara naratif dan didukung dengan bukti-bukti yang diperoleh dari data yang dikumpulkan.

3. Hasil dan Pembahasan

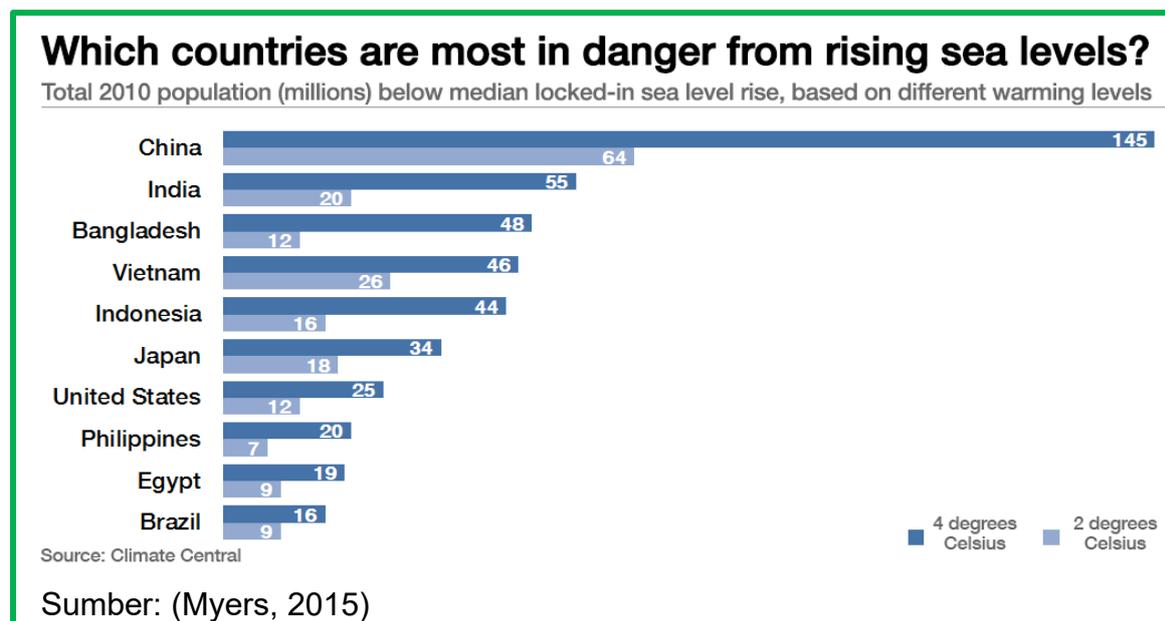
3.1 Kerentanan Indonesia terhadap krisis iklim dan hubungannya dengan kerentanan ASEAN.

Indonesia memiliki populasi terbesar, menempati posisi ke-4 di dunia demikian secara langsung dan tidak langsung berkontribusi pada penggunaan energi utamanya yang masih *massive* digunakan di Indonesia adalah energi batu bara yang tinggi dalam pelepasan gas rumah kaca. Lebih rincinya masih pada tahun yang sama yaitu 2023 daerah D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur adalah daerah yang mengalami kekeringan ekstrim (>60 hari tanpa hujan) (Damiana, 2024). Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun 2024 melancarkan program pompanisasi, tepatnya pada bulan Juni 2024 Presiden Joko Widodo turun langsung untuk melihat implementasi pompa air di kecamatan Tuntang, Jawa Tengah.

Naiknya permukaan laut Jawa sebagai akumulasi perubahan iklim diseluruh dunia menjadikan Jakarta berada ditingkat pertama sebagai kota paling rentan terhadap ancaman lingkungan di dunia (Yale Program on Climate Change, 2023). Penggunaan bahan bakar fosil adalah sektor yang paling kontra karena kompleksnya kebutuhan dan permintaan untuk bahan bakar fosil tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia masih mencoba pendekatan masing-masing menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial dan geografi. Deforestasi karena penggundulan hutan dan dijadikan lahan sawit sudah tentu tidak bertanggung jawab ditambah dengan pembersihan hutan gambut yang kaya akan karbon kemudian berakumulasi menjadikan Indonesia menempati posisi 10 besar negara emitter gas rumah kaca di dunia pada tahun 2022 (Grehenson, 2023).

Indonesia masih butuh dengan diratifikasinya AATHP meyakinkan AMS lainnya karena "*behavior*" Indonesia sebelumnya yang membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade tepatnya 12 tahun dibanding AMS yang lain untuk meratifikasi AATHP

(Purnamawati, 2014). Ini mengapa pada masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tentu menemui masalah kompleks karena asap lintas batas adalah akumulasi dari proses birokrasi yang tidak efektif, aktivitas illegal manusia mulai dari perusahaan, pemerintah, sampai individu ditingkat lokal (Wicaksana & Wardhana, 2021). Setelah diratifikasinya AATHP, Indonesia masih harus terus memberi data terbaru deforestasi di Indonesia. Data terakhir deforestasi Indonesia pada tahun 2021-2022 berada pada titik terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan secara keseluruhan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo utamanya tahun-tahun setelah 2015, Indonesia berhasil menurunkan kebakaran hutan sebanyak 80%.



Data ini menunjukkan 3 AMS Vietnam, Indonesia, dan Filipina menduduki peringkat 10 teratas negara-negara dunia paling terdampak dari naiknya permukaan air laut. Berada dalam satu atap ASEAN dan kondisi geografi yang hampir sama dengan garis pantai yang panjang dan pusat pemukiman dan mata pencaharian di sepanjang garis pantai menjadikan 3 AMS rentan dan tentu harus dijadikan fokus oleh tiap keketuaan ASEAN.

Wilayah Asia Tenggara akan menghadapi dampak ekonomi yang signifikan akibat kenaikan permukaan laut. Indonesia, Thailand dan Vietnam akan menghadapi kerusakan yang lebih parah dibandingkan negara-negara anggota AMS lainnya. ASEAN berpotensi kehilangan setidaknya 35% dari PDB kawasan pada tahun 2050 akibat perubahan iklim. Potensi kehilangan PDB kawasan ini berdampak pada sektor kunci seperti agrikultur, pariwisata, dan perikanan serta kesehatan manusia dan produktivitas tenaga kerja. Populasi AMS yang berjumlah 600 juta orang berisiko mengalami cuaca yang lebih panas, musim hujan yang lebih panjang, dan peningkatan kekeringan, karena suhu global diperkirakan akan meningkat sebesar 1,5° C diatas suhu pra-industri selama 20 tahun ke depan. Naiknya permukaan air laut juga akan berdampak pada ASEAN karena banyaknya orang yang tinggal di dataran rendah pesisir (NTU, 2021).

3.2 Restorasi ekosistem lewat agensi BRG

Kebijakan ini pertama kali diwujudkan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan membentuk BRG (Badan restorasi Gambut) pada 2016. BRG telah berhasil merestorasi sebanyak 200.000 hektar lahan gambut lalu pada tahun 2017 BRG berhasil merestorasi 200.000 hektar lahan gambut di provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan (Ihsanuddin, 2017).



Demikian dengan keberhasilannya mendekati target, BRG sendiri tidak memungkiri bahwa ada kebijakan dalam kementerian pertanian yang tidak sejalan dengan kerja yang dicapai BRG. Presiden Joko Widodo melalui program kementerian pertanian pada tahun yang sama 2017 justru meresmikan program peremajaan (*replanting*) kebun kelapa sawit sebanyak 4.400 hektar. Kebijakan 2 kementerian ini kontradiktif karena kebijakan kementerian pertanian untuk peremajaan ini menargetkan distribusi kepemilikan lahan sawit untuk masyarakat sekitar, demikian ahli BRG sudah memprospek bahwa program peremajaan lahan sawit ini akan dimiliki masyarakat tidak sampai 10 tahun kedepan karena korporasi atau perusahaan akan memiliki 90% lahan-lahan itu nantinya (Nugraha, 2020).

3.3 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja (Omnibus Law)

Sebelumnya, perizinan berusaha dibidang lingkungan hayati diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 perihal proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan pendekatan berbasis biar (*licence approach*). Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tepatnya pada 2 November 2020 melalui Omnibus Law atau UU Ciptaker pendekatannya diubah menjadi berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*), atau AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan, artinya izin berusaha dibidang lingkungan hayati diberikan pemerintah sesuai dengan hasil perhitungan nilai tarif bahaya dan nilai potensi terhadap kesehatan,

keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan sumber daya itu sendiri (Nur et al., 2021).

Sama halnya seperti kebijakan restorasi ekosistem, Presiden Joko Widodo juga menekankan pada proses birokrasi dalam perizinan usaha lingkungan hayati di Indonesia dan UU Ciptaker prosesnya harus disederhanakan. Namun demikian artikel 29,30,31 dari UU Ciptaker memang tetap mempertahankan AMDAL tetapi menghapus fungsi komite independen yang terdiri dari LSM dan aktivis lingkungan (PSSAT UGM, 2021). Agensi sebagaimana fungsionalis menempatkan agensi ini adalah aktor utama untuk mengatasi dan mencapai target tertentu dalam hal ini krisis iklim dengan indikator capaian kesejahteraan dan mempermudah investasi. Ini mengapa UU Ciptaker dianggap dapat merugikan tenaga kerja lokal dan masyarakat sekitar karena fungsi advokasi dari institusi independen LSM dan ahli-ahli yang banyak merilis data-data real-time kemudian tidak direkomendasikan menjadi komite di proses birokrasi UU Ciptaker.

3.4 Kebijakan-kebijakan ASEAN terkait lingkungan

ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)

Dibentuk pada tahun 2009 AWGCC berperan untuk mengimplementasikan aksi-aksi yang relevan dengan ASCC *Blueprint* (2009-2015) dan ASCC *Blueprint* 2025. ASCC *Blueprint* (2009-2015) sendiri memiliki bagian khusus yaitu D “*Ensuring Environmental Sustainability*”, ASEAN akan berpartisipasi aktif dalam upaya global untuk mengatasi tantangan lingkungan global, termasuk perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon, serta mengembangkan dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan (ASEAN Secretariat, 2009). Peran lain dari AWGCC sebagai *working group* utama untuk mengatasi krisis iklim AMS adalah sebagai *platform* konsultatif dan kolaboratif untuk meningkatkan kerja sama dan tindakan regional dalam mengatasi dampak buruk perubahan iklim, merumuskan kepentingan, keprihatinan, dan prioritas kawasan dalam Pernyataan Bersama ASEAN tentang Perubahan Iklim (ASEAN Environment Knowledge Hub, 2022).

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

ASEAN membuat perjanjian AATHP pada tahun 2002 dengan tujuan mencegah dan memantau asap lintas batas lewat upaya nasional dan kerjasama internasional karena asap kebakaran pada tahun 1997-1998 dan berdampak mulai dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (Ariyani & Parameswari, 2019). Indonesia sendiri menunggu hingga 12 tahun untuk akhirnya meratifikasi AATHP. Kemudian AATHP sendiri banyak mengalami dinamika pertimbangan dari periode pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo. Prinsip non-intervensi masih menjadi prinsip yang sulit dikoordinasikan pada saat itu karena membutuhkan penanganan cepat ketika *hotspot* dekat perbatasan dengan AMS lainnya terdeteksi sementara Indonesia lamban dalam upaya responsif negara AMS lain menawarkan kerjasama ataupun penempatan pengawas antar negara. Demikian walau lamban dalam proses ratifikasi padahal sebagai aktor utama dan tempat *hotspot* terbanyak diantara AMS, Indonesia menggunakan pendekatan pencegahan dan perbaikan melalui BRGM.

ASEAN Climate Resilience Network (ASEAN-CRN)

ASEAN-CRN ini adalah bentuk kerjasama AMS membuat *platform* untuk pertukaran informasi, pengalaman dan keahlian regional untuk berbagi tentang sistem pertanian cerdas yang ramah iklim. Jaringan ini memfasilitasi agar temuan-temuan penelitian lebih mudah diadaptasi ke dalam kebijakan dan menemukan sumber daya untuk mendukung kebutuhan sektor ini di kawasan. Hasil akhir adalah dorongan untuk AMS mengadaptasi kerangka kerja dengan 5 area fokus (1) implementasi perjanjian regional di tingkat nasional; (2) manajemen pengetahuan dan peningkatan kapasitas; (3) memobilisasi sumber daya; (4) kebijakan dan keterlibatan regional; dan (5) penelitian dan pengembangan (ASEAN-CRN Interim Secretariat, 2024).

The 26th Renewable Energy Sub-Sector Network (RE-SSN)

ASEAN sendiri melalui *the 26th Renewable Energy Sub-Sector Network (RE-SSN)* pada tahun 2019, mempunyai target kolektif yaitu ingin mencapai 23% energi terbarukan sebagai pasokan energi primer pada tahun 2025. Target kolektif ini menjadi inti dari penelitian oleh IRENA dimana mencoba melihat skenario yang memungkinkan diambil oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai target kolektif 23% penggunaan energi terbarukan. Salah satu skenario yang memungkinkan adalah *Planned Energy Scenario (PES)*. PES menghasilkan data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2050 dengan meningkatnya populasi dan pertumbuhan ekonomi menjadikan konsumsi energi di ASEAN akan mencapai 2,5 kali lipat pada tahun 2050 (IRENA & ACE, 2022). Pada akhirnya skenario oleh IRENA ini tidak memungkiri akan tidak benar-benar tercapainya target kolektif sebanyak 23% energi terbarukan sebagai sumber energi primer di ASEAN pada tahun 2025, demikian penelitian ini cukup optimis dengan angka yang dihasilkan dari skenario PES yaitu 14% pada tahun 2020 dan 18% pada tahun 2025. IRENA juga menyimpulkan bahwa negara-negara ASEAN dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri jika memotong sebanyak 75% penggunaan energi yang menghasilkan karbondioksida (International Renewable Energy Agency, 2022).

3.5 Kerjasama Indonesia-ASEAN selama keketuaan ASEAN 2023

Keketuaan ASEAN 2023

Memegang keketuaan ASEAN 2023 Indonesia memusatkan pagelaran dan konferensi-konferensi di 2 kota yaitu Jakarta dan Labuan Bajo. *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth* menjadi judul yang diusung, menggarisbawahi visi kepemimpinan Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi, inklusivitas keuangan, dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara dengan memperkuat kerja sama seluruh ASEAN *Member States (AMS)*. Dalam *kick-off* keketuaan ASEAN 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ASEAN akan terus berkontribusi terhadap Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan stabil serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi regional. "Krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, dan peperangan, semuanya kita hadapi tahun ini," kata Widodo. "ASEAN akan tetap penting dan relevan bagi masyarakat di kawasan ini dan sekitarnya karena ASEAN adalah pusat pertumbuhan" (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Berikut beberapa poin hasil dari *43rd ASEAN Summit*, bagian dari Keketuaan Indonesia yang berkaitan langsung dengan skema mengatasi krisis iklim diantara ASEAN *Member States*:

(2) *ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC COP28.

(11) *Second Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation (Haze-Free Roadmap) 2023-2030.*

(12) *Second ASEAN Peatland Management Strategy (APMS) 2023-2030*

(13) *Investment Framework for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia A ten-year investment framework (2021-2030)*

(19) *Joint Statement of the 2nd ASEAN Ministerial Dialogue on Accelerating Actions to Achieve the Sustainable Development Goals*

(20) *Establishment Agreement of the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC)*

(21) *Establishment Agreement of the ASEAN Centre for Climate Change*

Sumber: (The ASEAN Magazine, 2023).

ASEAN Climate Forum

ASEAN *Climate Forum* menyoroti komitmen dan tindakan bisnis, pentingnya meningkatkan pasar karbon, dan peran keuangan berkelanjutan dalam mencapai netralitas karbon. “Asia Tenggara merupakan kawasan yang kaya akan potensi, namun sangat rentan terhadap perubahan iklim. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dari ASEAN untuk mencapai emisi karbon nol bersih di kawasan ini,” (Kominfo, 2023). ASEAN *Climate Forum* melibatkan mitra kerja dalam ranah bisnis mulai dari Bloomberg (media), NEF, PwC, and *Equatorise Advisory as well as the Indonesian Chamber of Commerce and Industry* (Sekretariat KADIN Indonesia, 2023).

Aktor-aktor yang tergabung dalam forum ini datang dari berbagai ekspertasi seperti aktor swasta untuk aspek finansial. Kemudian distribusi informasi kepada publik lewat partner media, dan agensi yang berisi aktor negara untuk memformulasikan kebijakan domestik. Semua sumber dalam data yang telah dipaparkan sangat menitikberatkan pada upaya kerjasama, *joint-commitment*, dan *knowledge exchange* antar institusi dengan ekspertasi yang berbeda. Krisis iklim merupakan masalah multidimensi sehingga membutuhkan kerjasama multi aktor dan multi solusi untuk mencapainya. Penelitian Linda Sulistiawati mencoba memaparkan bagaimana kerentanan Indonesia sudah di tahap yang mengkhawatirkan baik bagi Indonesia sendiri dan negara tetangga yang terdampak (Sulistiawati, 2020).

Poin-poin diatas menunjukkan mulai dari *joint statement*, *roadmap*, *framework*, hingga pendirian pusat-pusat pengawasan asap lintas batas dengan Indonesia sebagai *host country*, menandakan bahwa negara-negara yang bergabung ingin memberikan dan bertukar *best-practices policies* dan disaat yang sama bertukar ahli, peneliti, dan anggota yang mewakili masing-masing negara yang menunjukkan bagaimana rentannya AMS sehingga membentuk agensi, *working group*, dan *framework* untuk mengatasi isu yang sama.

Realita Diplomasi Iklim Indonesia terhadap ASEAN

Penelitian oleh *Centre of World Trade Studies* Universitas Gadjah Mada dengan jelas menuliskan investasi dan kerjasama dalam bidang kebijakan dan teknologi menjadi solusi potensial yang akan mendorong pengembangan ekonomi hijau di ASEAN. Industri hijau akan membuka lebih dari 30 juta kesempatan kerja pada 2030 jika ASEAN dapat memanfaatkan ini. Industri hijau pada saat yang sama dapat menolong ASEAN menurunkan 80% dari emisi karbon yang masih *massive* digunakan di seluruh kawasan ASEAN utamanya untuk transportasi. Industri hijau sendiri membutuhkan pendanaan yang dapat diperoleh dari *foreign direct investment* atau FDI. FDI membawa dana untuk pengembangan teknologi dan pekerjaan yang saat ini kerap disebut *green jobs*. Namun kesempatan ini menuntut *host-country* untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mumpuni dan lingkungan yang siap disaat bersamaan membuat kebijakan yang mengurangi untuk menghindari dibawanya tenaga kerja dari luar *host-country* (Singarimbun, 2023).

Skema ambisius ini adalah dengan membangun iklim bisnis yang baik dan mempromosikan ASEAN sebagai pusat investasi dan perdagangan yang menarik (Suri et al., 2023). Ini mengapa Presiden Joko Widodo berambisi membangun IKN dengan penggunaan energi terbarukan 100% (Mubarok, 2024). Jika berhasil dan ambisi ini kemudian terwujud harapannya bisa menjadikan Indonesia tempat berbisnis dalam dan diantara ASEAN *Member States* (AMS). Demikian dari Indonesia sendiri memiliki kebijakan bertabrakan, IKN dengan target terlampaui ambisius yaitu 100% penggunaan energi terbarukan, sementara masih mengoperasikan PLTU bahkan sejak 2013 makin meningkat hingga sepuluh kali lipat dengan penggunaan PLTU ini adalah untuk penggunaan sendiri atau captive untuk para pelaku industry (Pristiandaru, 2024). Demikian tidak hanya dalam lingkup ASEAN Indonesia sudah menunjukkan behavior yang menurunkan trust dari sesama AMS untuk ratifikasi dan penanganan sesuai AATHP. Namun secara domestik juga banyak kebijakan Indonesia yang kontra satu sama lain dan sangat sulit untuk dipetakan menjadi kebijakan efektif yang bisa menjadikan diplomasi iklim Indonesia terhadap ASEAN lebih signifikan.

Kebergantungan kompleks dalam badan ASEAN dengan prinsip non-intervensi menjadi lebih kompleks ketika mengatasi masalah krisis iklim lewat penguatan ekonomi dan beralih menggabungkan energi antara energi terbarukan dan tenaga batu bara untuk tiap ASEAN *Member States* (AMS). "*Regional organizations elsewhere have interfered in a wide range of domestic affairs, from economic to social, and political and security issues. ASEAN itself became economically intrusive when it established a mechanism to monitor its member states' economic policies. Member states were willing to tolerate this level of intrusion because the payoff-securing their economic survival-was also a domestic prior.*" (Suzuki, 2019).

Interkonektivitas di sektor manapun semakin banyak saat ini dan tidak dapat dihindari namun dapat dipetakan agar menguntungkan masing-masing pihak tidak terkecuali institusi ASEAN. Tidak hanya keuntungan namun kerugian atau dampak dari aktivitas baik itu untuk menanggulangi krisis iklim atau krisis iklim itu sendiri yang membuka kesempatan menguntungkan artinya membutuhkan kebijakan efektif dari masing-masing badan kerja negara atau dalam fungsionalis disebut agensi atau institusi. Dalam situasi kebergantungan kompleks dan interkonektivitas energi regional, Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo cenderung

membenahi institusi dalam negeri dahulu setelahnya mulai mempertimbangkan untuk ikut dalam upaya regional ASEAN. Langkah ini memang sudah mutlak dilakukan menyadari “*trust*” dari AMS yang sebelumnya diragukan karena ratifikasi AATHP oleh Indonesia memakan waktu hingga 1 dekade dan “*bargaining*” penting setiap memutuskan untuk bergabung dalam kerjasama dalam satu payung institusi. Terlebih, institusi lain seperti Uni Eropa yang gencar dengan pendanaan industri hijau untuk negara-negara berkembang membutuhkan iklim bisnis yang baik dan terpercaya (*trust*) untuk mereka bekerjasama dengan ASEAN (Bomassi et al., 2023).

Sama halnya seperti cara, metode dan kebijakan untuk mengatasi krisis iklim yang sangat *country-specific* mengingat kondisi geografi, sosial, dan ekonomi tiap AMS berbeda dan unik. Diplomasi iklim Presiden Joko Widodo harus dapat mengatur banyaknya kompromi dalam masalah-masalah ekonomi, energi, perubahan iklim semuanya perlu diseimbangkan melalui koordinasi kebijakan ditingkat tertinggi. Kebijakan ditingkat tertinggi dimaksudkan dalam pandangan fungsionalis adalah *a whole government* dimana diplomasi iklim dianggap tidak akan efektif jika hanya mengandalkan satu pemerintahan saja tanpa membentuk agensi atau institusi berisi ahli dibidangnya. Seperti halnya 1 kementerian lingkungan karena akan sangat tidak mungkin jika diplomasi iklim dibebankan pada satu kementerian saja. Mabey juga menganggap bahwa diplomasi tidak hanya sekedar proyeksi eksternal karena perubahan iklim itu sendiri akan menjadi aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan suatu negara yang tentu akan mempengaruhi negara lainnya (Mabey & Gallagher, 2013).

Lebih spesifiknya melalui konsep fungsionalis yang memandang *human nature* sangat positif, berdasarkan kemampuan manusia untuk berposes dan ketika dihadapkan dengan masalah manusia pada *nature*nya dapat bersikap rasional dan kooperatif. “*According to the functionalism concept, human beings have to decide rationally about what their needs are and they have to be creative regarding “the construction of authoritative institutions that can perform the function assigned to them”.* Concerning the state, for functionalism, human needs and public welfare should foremost take into consideration rather than power politics (Kurt, 2009).

Konsep Fungsional dari Mitrany menyatakan suatu institusi akan efektif jika: 1) Spesifikasi isu, dalam hal ini yang telah dilakukan Indonesia seperti membentuk BRG untuk mengatasi isu penghilangan lahan gambut yang tidak bertanggung jawab kembali direstorasi; 2) Ekspektasi, dalam hal ini orang-orang yang bergabung dalam BRG adalah yang melek isu dan ahli dalam bidang seperti ilmuwan lingkungan khususnya untuk restorasi; dan 3) Pengadaan insentif dan konsekuensi, dalam hal ini melalui insentif pengawas lokal yang berhasil menurunkan “*hotspot*” kebakaran di daerahnya memperoleh kenaikan pangkat dan sebaliknya. Dengan demikian fungsionalitas kebijakan domestik Indonesia bisa lebih efektif jika didasarkan pada ekspertasi 1 agensi atau institusi berisi ahli-ahli dibidangnya, untuk mencapai tujuan-tujuan Indonesia mengatasi krisis iklim di Indonesia dan disaat yang sama berkontribusi untuk AMS. Menurut pemikiran kaum fungsionalis, aktor atau pakar teknis merupakan pembawa utama dan bukan wakil pemerintah dalam rangka menjalin kerja sama. Oleh karena itu, mereka lebih menekankan pada ahli teknis dan teknokrat dibandingkan politisi untuk membangun kelembagaan yang kooperatif.

Mitranya tidak menyangkal bahwa perubahan akan kebutuhan manusia akan sangat dinamis dan berubah sepanjang waktu, tempat, logika institusi transnasional harus terbuka dengan inovasi yang melewati batas nasional seperti halnya yang telah dilakukan BRG yaitu belajar dari sistem agensi dalam negeri Malaysia untuk merestorasi lahan gambut dan prosesnya fleksibel. Sejalan dengan anggapan Mitrany ini penanaman investasi untuk industri yang lebih hijau adalah yang dibutuhkan di Indonesia. Namun, iklim berbisnis domestik sudah harus transparan agar dapat menarik perhatian investor. Setelah menarik investor, institusi dalam negeri harus sudah kuat menghindari banyaknya tenaga kerja luar negeri alih-alih menyerap tenaga dalam negeri yang memang diharapkan sudah siap dengan kemampuan mumpuni sesuai industri yang cukup baru yaitu industri hijau. Demikian diplomasi iklim sendiri cukup kompleks dikarenakan butuh untuk menghubungkan perdebatan antara kepentingan nasional dan kerja sama internasional. Kemudian Indonesia sendiri yang pada dasarnya perlu upaya lebih dibanding negara sesama AMS seperti Singapura (The ASEAN Post Team, 2020). Upaya lebih ini untuk memperoleh kepercayaan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional terlebih negara-negara maju yang gencar untuk investasi hijau dan Indonesia membutuhkan investasi tersebut. Pada akhirnya, solusi untuk masalah krisis iklim yang kompleks dan multisektor juga membutuhkan cara yang efektif dan banyak institusi yang spesifik dalam rangka kerja dan orang-orang didalamnya ahli dalam bidang tersebut.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih terlihat signifikan dalam kebijakan-kebijakan domestik dan untuk kebijakan regional sendiri terlihat didasarkan karena perputaran keketuaan ASEAN. Dimana ingin tidaknya tetap harus menjadi keketuaan sesuai perputaran dan tidak terlihat menginisiasi kebijakan inovatif melainkan mengikuti dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dalam badan ASEAN sendiri dari keketuaan sebelumnya. Demikian menyadari kondisi lingkungan Indonesia dan birokrasi yang rumit, untuk mencari solusi seperti halnya sekma yang diinisiasi *ASEAN Centre for Energy (ACE)* mulai dari Listrik bersih atau Listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, solar, dan angin. Kemudian yang sudah banyak dibahas oleh ahli seperti skema energy mix sampai bertahap sepenuhnya menggunakan energi terbarukan pada tahun 2050 (*ASEAN Centre for Energy, 2023*). Kemudian dalam ranah domestik untuk IKN menggunakan 100% energi terbarukan merupakan target terlampaui ambisius pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo jika tidak dibarengi dengan pemetaan kebijakan yang saling mendukung dan masih akan terus berlanjut mengingat IKN sendiri jika mengikuti fase pembangunan akan selesai pada tahun 2045 dan target secara regional penggunaan energi terbarukan adalah tahun 2050 yang artinya akan sangat berdekatan capaian selesainya IKN dengan skema yang telah diinisiasi ACE (*Putri & Nugroho, 2022*).

Krisis iklim pada akhirnya memang sangat kompleks karena sinkron dari segi dampak dan cara memitigasi negara manapun. Institusi Indonesia sudah memiliki masing-masing kerangka kerja dan isu tersendiri untuk diselesaikan dalam lingkup sektor mereka masing-masing. Ekspertasi dan spesifikasi kerangka kerja tetap diperlukan berangkat dari keberhasilan BRG, sekarang BRGM yang dipimpin dan berisi ahli-ahli dalam bidang restorasi dan sangat kolaboratif karena melibatkan masyarakat setempat yang berfungsi sebagai pengawas dna juga pemelihara.

Kebijakan dalam negeri Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti UU Ciptaker adalah salah satu yang paling signifikan. UU Ciptaker signifikan karena berbarengan dengan membuka investasi dari luar yang mana akan sangat membantu percepatan pembangunan jika dipetakan dengan efektif oleh pemerintah Indonesia. Namun, berangkat dari penghapusan peran fungsi komite independen yang terdiri dari LSM dan aktivis lingkungan saat diberlakukannya UU Ciptaker dan bagaimana disebutkan oleh salah satu ahli bahwa internet dan konektivitas menjadi isu utama jika pemerintah Indonesia ingin melihat perkembangan implementasi kebijakan untuk mitigasi krisis iklim karena isu ini karena sangat *data-driven*. Kolaborasi tidak melulu harus antar institusi negara namun mempertimbangkan rekomendasi dari ahli-ahli baik independen dan dinaungi satu institusi *concerning* pada lingkungan sudah seharusnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai kelompok yang paling terdampak dari satu kebijakan yang diambil pemerintah.

4. Kesimpulan

Krisis iklim dapat dimitigasi dengan menyelaraskan kebijakan tiap negara termasuk ASEAN *Member States* atau AMS dalam satu wilayah regional Asia Tenggara. Kompleksnya aktor dan sektor yang berperan dalam setiap kebijakan sangat berpengaruh pada capaian atau target yang diinginkan tiap AMS. Indonesia sebagai anggota tetap AMS dan selalu berada dalam peringkat 10 besar negara paling rentan terhadap krisis iklim sudah seharusnya merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dapat menyelesaikan faktor-faktor percepatan krisis iklim baik nasional maupun regional ASEAN. Regional ASEAN penting karena sama seperti Indonesia, AMS lainnya juga selalu masuk dalam peringkat 10 besar negara paling rentan terhadap krisis iklim. Melihat mulai dari kebijakan atau kerangka kerja sampai ketentuan *action plan* yang dihasilkan institusi dalam ASEAN sudah sangat banyak yang merumuskan dan merekomendasikan kerangka kerja untuk tiap sektor ditiap AMS. Sama seperti Indonesia dalam kebijakan nasionalnya sudah banyak membentuk institusi atau agensi untuk tiap sektor berpengaruh pada percepatan krisis iklim. Institusi ini mulai dari sektor kehutanan seperti penyatuan KLHK, pembentukan BRGM, dan DJPPI. Sebagaimana disarankan dari asumsi fungsionalis, peran institusi berisi para ahli ditiap bidang yang ingin dikaji cenderung berhasil. Fungsionalis sudah menjelaskan bagaimana institusi dengan spesifikasi ekspertasi cenderung berhasil karena aktor-aktor didalamnya adalah para ahli dalam bidang mereka.

Asumsi ini jika dilihat dari institusi atau agensi dalam negeri yang paling signifikan adalah BRGM yang bisa mendekati target untuk merestorasi lahan gambut sebagai faktor signifikan menurunkan emisi GRK. Demikian keberhasilan institusi dalam negeri ini ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN 2023 sebenarnya dapat dimaksimalkan, melihat *press release* pada keketuaannya, Indonesia cenderung menerapkan kebijakan ASEAN, *action plan*, dan *working group* yang memang sudah ada dari keketuaan-keketuaan AMS sebelumnya. Ini mengapa penelitian ini melihat dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode memang masih sangat kearah domestik. Sejak awal periode pertamanya, Presiden Joko Widodo cukup signifikan dalam memberi perhatian untuk krisis iklim ASEAN dengan segera meratifikasi AATHP yang tertunda 12 tahun diikuti dengan membentuk institusi melakukan fungsi AATHP yaitu BRG. Demikian

dengan banyaknya ahli yang bahkan selalu mengeluarkan hasil penelitian terkait krisis iklim dan kesempatan yang bisa Indonesia manfaatkan masih cenderung tidak diindahkan oleh para pembuat kebijakan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ariyani, F., & Parameswari, P. (2019). Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019. *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 58.
- ASEAN-CRN Interim Secretariat. (2024). *9th ASEAN Climate Resilience Network (ASEAN-CRN) Annual Meeting Charts Progress and Deliberates on a New Work Plan*. <https://asean-crn.org/9th-asean-climate-resilience-network-asean-crn-annual-meeting-charts-progress-and-deliberates-on-a-new-work-plan/>
- ASEAN Centre for Energy. (2023). *The 2nd Focus Group Discussion on ASEAN Renewable Energy Long-term Roadmap*. <https://aseanenergy.org/post/the-2nd-focus-group-discussion-on-asean-renewable-energy-long-term-roadmap/>
- ASEAN Environment Knowledge Hub. (2022). *Revised AWGCC Action Plan (2019-2025)*. 1, 1–3.
- ASEAN Secretariat. (2009). *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*. 14–20.
- ASEAN Studies Center. (2021). *Fighting Climate Change: A New Challenge for ASEAN Multilateralism*. <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2021/09/24/fighting-climate-change-a-new-challenge-for-asean-multilateralism/>
- Bomassi, L., Kuik, C.-C., Lay, J., Yeo, H., Lazard, O., Manantan, M., & Youngs, R. (2023). *Reimagining EU-ASEAN Relations: Challenges and Opportunities*. 6–13.
- CSIS. (2021). *Security Challenges of Climate Change in Southeast Asia*. <https://www.csis.org/analysis/security-challenges-climate-change-southeast-asia>
- Damiana. (2024). *4 Provinsi RI Siaga 1 Kekeringan, di Daerah Ini 87 Hari Tak Ada Hujan*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240716145624-33-555050/4-provinsi-ri-siaga-1-kekeringan-di-daerah-ini-87-hari-tak-ada-hujan>
- European Union. (2022). *Opinion of the European Committee of the Regions — The CoR's role in boosting subnational climate diplomacy ahead of COP27 and COP28*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022IR2284>
- Grehenson, G. (2023). *Kepala BMKG: Indonesia Keluar dari 10 Besar Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca*. Liputan Laman UGM. <https://ugm.ac.id/id/berita/kepala-bmkg-indonesia-keluar-dari-10-besar-penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca/>
- Ihsanuddin. (2017). *Restorasi Gambut Libatkan Swasta dan Masyarakat*. Kompas.
- International Renewable Energy Agency. (2022). *Southeast Asia can save energy costs of up to USD 160 billion; addressing energy security and climate risks through energy transition, says IRENA*. <https://www.irena.org/News/pressreleases/2022/Sep/ASEAN-Can-Cover->

Two-Thirds-of-Energy-Demand-with-Renewables

- IRENA & ACE. (2022). Renewable energy outlook for ASEAN towards a regional energy transition. In *International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi; and ASEAN Centre for Energy, Jakarta*. www.irena.org
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *President Jokowi kicks off Indonesia's 2023 ASEAN Chairmanship*. <https://www.kemlu.go.id/yangon/en/news/22925/president-jokowi-kicks-off-indonesias-2023-asean-chairmanship>
- Kominfo. (2023). *ASEAN Climate Forum, Arsjad Rasjid: Asia Tenggara Dorong Pencapaian Emisi Net Zero Carbon*. <https://asean2023.id/id/news/asean-climate-forum-arsjad-rasjid-southeast-asia-leads-the-way-to-net-zero-carbon-emissions>
- Kurt, Ü. (2009). *Europe of Monnet, Schumann and Mitrany: A Historical Glance to the EU from the Functionalist Perspective*. 41–60.
- Mabey, N., & Gallagher, L. (2013). *Understanding Climate Diplomacy to avoid dangerous climate change*. October.
- Mubarok, F. (2024). *Ekonom: Target Pembangunan IKN Terlalu Ambisius dan Mengada-ada*. Tirto.Id. https://tirto.id/ekonom-target-pembangunan-ikn-terlalu-ambisius-dan-mengada-ada-gZoT#google_vignette
- Myers, J. (2015). *Which countries will be most affected by rising sea levels?* World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2015/11/which-countries-will-be-most-affected-by-rising-sea-levels/>
- NTU. (2021). *ASEAN risks losing 35 % GDP by 2050 from climate change*. <https://www.openaccessgovernment.org/asean-climate-change/123591/>
- Nugraha, I. (2020). *Empat Tahun BRG: Daya dan Upaya Pulihkan Gambut Negeri*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/28/empat-tahun-brg-daya-dan-upaya-pulihkan-gambut-negeri/>
- Nur, M. I., Fraiskam, N., & Pangaribuan, R. F. (2021). PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), 2353–2363.
- Pristiandaru, D. L. (2024). *Dalam 10 Tahun, PLTU Batu Bara "Captive" RI Naik 10 Kali*. *Lipat*. Kompas.Com. <https://lestari.kompas.com/read/2024/04/26/150000786/dalam-10-tahun-pltu-batu-bara-captive-ri-naik-10-kali-lipat>
- PSSAT UGM. (2021). *The Development of Jokowi's plan; why the Omnibus Law is good for the economy but a threat to civil rights in Indonesia*.
- Purnamawati, D. (2014). *RI ratifies ASEAN agreement on transboundary haze pollution*. ANTARA News. <https://en.antaranews.com/news/95689/ri-ratifies-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution>
- Putri, D. L., & Nugroho, R. S. (2022). *5 Tahap Pembangunan IKN Dimulai 2022 Selesai 2045*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/01/170000965/5-tahap-pembangunan-ikn-dimulai-2022-selesai-2045?page=all>

- Sekretariat KADIN Indonesia. (2023). *ASEAN Climate Forum, Arsjad Rasjid: Southeast Asia Leads the Way to Net Zero Carbon Emissions*. <https://kadin.id/en/kabar/asean-climate-forum-arsjad-rasjid-asia-tenggara-dorong-pencapaian-emisi-net-zero-carbon/>
- Singarimbun, L. A. S. (2023). *Accelerating Green Economy in Indonesia's ASEAN Chairmanship*. CWTS UGM. <https://cwts.ugm.ac.id/en/2023/04/06/accelerating-green-economy-in-indonesias-asean-chairmanship/>
- Sulistiawati, L. Y. (2020). Indonesia's climate change national determined contributions, a farfetch dream or possible reality? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012022>
- Suri, B. A., Wardhana, A., Rashidi, R. A., & Kaswiyanto, R. (2023). *Powering Nusantara : Modeling the Electricity Future of Indonesia ' s New Capital City*.
- Suzuki, S. (2019). Why is ASEAN not intrusive ? Non-interference meets state strength strength. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 8(2), 157–176. <https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1681652>
- The ASEAN Magazine. (2023). *ASCC Outcomes under Indonesia's 2023 ASEAN Chairmanship*. <https://theaseanmagazine.asean.org/article/ascc-outcomes-under-indonesias-2023-asean-chairmanship/>
- The ASEAN Post Team. (2020). *Rising Sea Levels In Southeast Asia*. <https://theaseanpost.com/article/rising-sea-levels-southeast-asia>
- Wicaksana, I. G. W., & Wardhana, A. (2021). *Populism and foreign policy : The Indonesian case*. *August 2020*, 413–421. <https://doi.org/10.1111/aspp.12594>
- Yale Program on Climate Change. (2023). *Climate Change in the Indonesian Mind*.